

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia

Volume 12 Nomor 2, Desember 2015

**PENGARUH PENDIDIKAN KARAKTER KEAGAMAAN DAN OTORITAS  
ATASAN UNTUK BERBUAT CURANG TERHADAP  
PERILAKU TIDAK ETIS AKUNTAN<sup>1</sup>**  
*(The Effect of Religious Characters Education and Fraudulent Authorities on Ethical  
Behavior of Accountant)*

**Hafiez Sofyani**

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

hafiez.sofyani@umy.ac.id

**Nadia Rahma<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Indonesia*

nadia.rahma13@gmail.com

***Abstract***

*The purpose of this study is to examine the influence of the religious character education, supervisor authority to cheat and the interaction of these factors toward unethical behavior of accountants in financial reporting. This study used experiment approach i.e. 2x2 factorial between subjects. These results reveal that when there is a superior authority to cheat, the subject will tend to cheat in making financial statements (unethical). Furthermore, subjects who received religious character education will tend to behave ethically in making financial reports. The results also indicate that the religious character education has ability to mitigate the urge to do unethical which arise from authority of superiors to cheat factors.*

***Keywords: superior's authority to cheat, religious character education, unethical behavior of accountants***

***Abstrak***

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendidikan karakter keagamaan dan otoritas atasan untuk berbuat curang serta interaksi dari kedua faktor tersebut terhadap perilaku tidak etis akuntan dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen 2x2 faktorial antar subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika terdapat otoritas atasan untuk berbuat curang, maka subjek akan cenderung untuk curang dalam pembuatan laporan keuangan (berlaku tidak etis). Selanjutnya, subjek yang mendapatkan pendidikan karakter keagamaan akan cenderung berperilaku etis dalam pembuatan laporan keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter keagamaan memiliki kemampuan untuk memitigasi adanya dorongan untuk berbuat tidak etis yang muncul dari faktor otoritas atasan untuk berbuat curang. -

**Kata kunci: otoritas atasan untuk berbuat curang, pendidikan karakter keagamaan, perilaku tidak etis akuntan**

---

<sup>1</sup> Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para reviewer dan editor JAKI yang telah memberikan banyak masukan dalam proses perbaikan paper ini.

<sup>2</sup> Pada saat paper ini ditulis, penulis kedua sedang menempuh kuliah di perguruan tinggi yang namanya dicantumkan.

## PENDAHULUAN

Masalah perilaku tidak etis akuntan dalam beberapa dekade ini telah banyak menjadi sumber perhatian dan diangkat ke dalam isu penelitian (Cohen et al. 1993). Perilaku tidak etis akuntan yang paling sering ditemui adalah pada saat pelaporan keuangan, yaitu proses ketika seorang akuntan membuat laporan keuangan suatu entitas yang nantinya akan dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Ketidaketisan akuntan ini khususnya terjadi saat pembuatan laporan realisasi anggaran, baik di instansi pemerintah, lembaga non-profit, maupun lembaga profit seperti perusahaan (Sofyani dan Pramita 2014). Kecurangan pelaporan dapat secara langsung merugikan pemegang saham dan kreditor dari perusahaan penerbit laporan keuangan. Selama kecurangan berlangsung, hal itu dapat merugikan seluruh investasi perusahaan, seperti mengakibatkan kebangkrutan atau kegagalan perusahaan (Raab 1987; Sofyani dan Pramita 2014). Perilaku kecurangan pelaporan dalam jumlah kecil maupun besar yang dilakukan perusahaan dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor dan kreditor serta pemegang kepentingan (*stakeholders*) lainnya terhadap laporan keuangan perusahaan (Raab 1987; Mayhew dan Murphy 2009; Murphy dan Mayhew 2012).

Kecurangan pelaporan yang kerap dilakukan akuntan dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti tingkat penalaran moral, *locus of control*, empati, *self interest*, dan responsibilitas, serta faktor eksternal (situasi), seperti otoritas dari atasan untuk melakukan kecurangan, ada tidaknya kewajiban penyampaian laporan ke publik, ancaman retaliasi (pembalasan dendam), kesempatan, dan tekanan dari orang lain (Trevino 1986; Rotter 1990; Ponemon 1992; Tsui dan Ferdinand 1996; Rutledge dan Karim 1999; Liyanarachchi dan Newdick 2009; Mayhew dan Murphy 2009; Murphy dan Mayhew 2012; Sofyani dan Pramita 2014). Selain dari dua faktor utama di atas, perilaku etis akuntan juga dapat dipengaruhi oleh pernah tidaknya seorang akuntan menempuh pendidikan bertema etika (Mayhew dan Murphy 2009).

Temuan dari Mayhew dan Murphy (2009) mengindikasikan bahwa pendidikan adalah sarana penting untuk mendidik para akuntan agar bersikap etis ketika berada di lingkup kerja mereka. Selain pendidikan bertema etika, pendidikan keagamaan yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan dan identik dengan nilai-nilai etis juga memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan. Argumen ini sesuai dengan hasil penelitian Mazereeuw-van der Duijn Schouten et al. (2014) yang menemukan bahwa nilai-nilai ajaran agama yang ditaati (*religiosity*) dari individu yang diperoleh dari pendidikan karakter keagamaan yang sarat dengan nilai-nilai etis (Mayhew dan Murphy 2009) memiliki hubungan terhadap perilaku atau cara berperilaku individu tersebut (Sofyani et al. 2016).

Berdasarkan beberapa argumen di atas, maka penelitian ini akan menguji pengaruh pendidikan karakter keagamaan terhadap perilaku etis akuntan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Mayhew dan Murphy (2009) yang menguji pengaruh pendidikan etika dan tuntutan pelaporan kepada publik terhadap perilaku etis akuntan dalam membuat laporan keuangan, penelitian ini memasukkan faktor kontra yang dikembangkan dari penelitian Murphy dan Mayhew (2012) serta Sofyani dan Pramita (2014), yakni otoritas atasan untuk membuat laporan yang curang. Murphy dan Mayhew (2012) menemukan bahwa otoritas atasan untuk melaporkan lebih dari seharusnya memengaruhi individu untuk berperilaku tidak etis dengan mengalihkan atau menggeser tanggung jawab atas perilaku kecurangan tersebut kepada pemberi otoritas (Sofyani dan Pramita 2014). Penghadiran faktor kontra ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran terkait dugaan bahwa faktor pendidikan karakter keagamaan tidak hanya menggiring individu untuk berperilaku etis, tetapi juga memiliki kekuatan untuk dapat memitigasi faktor yang dapat menggiring individu kepada perilaku tidak etis.

Dalam ranah penelitian akuntansi keperilakuan, penelitian yang menguji

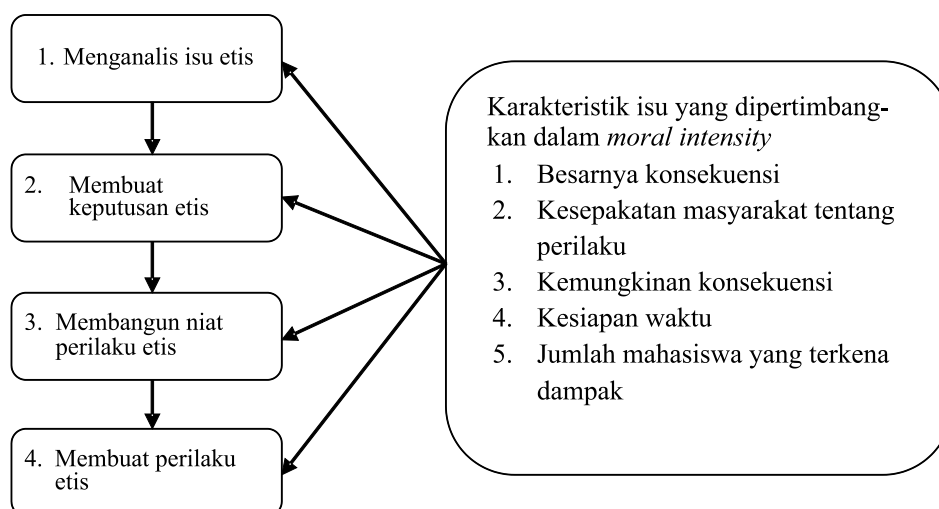
hubungan antara pendidikan karakter keagamaan dengan etika seorang akuntan belum banyak dilakukan. Begitu pula dengan penelitian apakah pendidikan karakter keagamaan yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan religiusitas dapat menjadikan seseorang berperilaku etis, juga masih jarang ditemui (Juanda dan Sofyani 2016). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mencari bukti empiris bagaimana pengaruh faktor pendidikan karakter keagamaan dan faktor otoritas, serta interaksi kedua faktor tersebut terhadap perilaku etis akuntan dalam membuat laporan keuangan. Perilaku pelaporan pada eksperimen ini merupakan pengganti perilaku pelaporan keuangan di lingkungan kerja nyata. Persepsi perilaku individu di kelas dapat dipertimbangkan sebagai penyuluh persepsi perilaku masa depan individu pada dunia bisnis (Allmon et al. 2000; Nahartyo 2012; Sofyani dan Pramita 2014), dan sektor publik untuk konteks penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pendidikan karakter keagamaan memiliki pengaruh terhadap perilaku etis individu dalam aktivitas pelaporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pimpinan institusi dalam merekrut pegawai keuangan agar memerhatikan aspek religiusitas yang dimiliki individu.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Proses Pembuatan Keputusan Etis dan Teori Perilaku yang Direncanakan

Proses pembuatan keputusan etis tersusun menjadi empat rangkaian sebagaimana yang dipaparkan pada Gambar 1 (Cohen dan Bennie 2006; Jones 1991; Jones et al. 2003). Pada tahap pertama, ketika menghadapi dilema etika, individu yang mapan dan memiliki kesadaran etis akan berupaya untuk mengenali dan menganalisis isu etis yang hadir atau dihadapi. Pada tahap kedua, individu akan mulai membuat keputusan etis. Pada tahap ketiga, individu akan membangun niat perilaku etis yang mana pada tahap niat ini individu akan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Terakhir, individu akan membuat tindakan (*action*) berupa perilaku etis terkait fenomena etika yang dihadapinya. Karakteristik-karakteristik dari isu-isu etika melibatkan empat tahap di atas. Dari berbagai hasil riset, secara umum, perilaku banyak individu dalam berperilaku yang terkait dengan isu-isu *moral intensity* yang mereka hadapi selalu mengikuti kerangka konseptual proses pembuatan keputusan etis di atas (Cohen dan Bennie 2006; Jones 1991; Jones et al. 2003).



Gambar 1

### Proses Pembuatan Keputusan Etis

Sumber: Jones (1991), Cohen dan Bennie (2006)

Kebanyakan riset terdahulu yang meneliti isu etika di ranah akuntansi menguji tahap 1-3 pada proses pembuatan keputusan etis, yakni melalui pengujian yang bersifat mengaitkan perilaku etis individu dengan kemampuan penalaran moral (*moral reasoning*) individu tersebut menggunakan instrumen *Defining Issues Test* (DIT) dari Rest (1986) dan DIT2 oleh Rest dan Narvaez (1998). Meski demikian, sudah ada penelitian yang menguji tahap 4 dari proses pembuatan keputusan etis, yakni perilaku etis individu (Jones et al. 2003; Sofyani dan Pramita 2014). Meskipun penalaran moral, keputusan etis, dan niat berperilaku etis adalah hal yang penting sebagai temuan riset, tetapi perilaku etis yang muncul dalam bentuk aksi memiliki bukti yang lebih kuat dibandingkan tiga hal yang dipaparkan sebelumnya tadi (Mayhew dan Murphy 2009).

Menurut Mayhew dan Murphy (2009), setidaknya ada tiga alasan yang menguatkan mengapa pengujian perilaku etis penting dilakukan: (1) perilaku adalah akhir dari model pembuatan keputusan etis, (2) hubungan antara kemampuan penalaran moral (*moral reasoning*) dan perilaku etis dapat digambarkan secara nyata, (3) pengukuran kepada perilaku secara langsung akan menurunkan terjadinya bias *social desirability*, yakni bias yang terjadi dalam bentuk individu yang diuji akan cenderung menjawab sesuai dengan jawaban yang diinginkan/tak-diinginkan peneliti. Oleh karena itu, desain eksperimen pada penelitian ini dirancang untuk mampu menguji hubungan faktor pemicu dilema etika dengan perilaku etis individu agar hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata dan kuat terkait aksi atau tindakan yang dilakukan oleh individu ketika menghadapi dilema etika.

Proses pembuatan keputusan etis yang dipaparkan Jones (1991) dan Cohen dan Bennie (2006) sebenarnya dapat dihubungkan dengan teori perilaku yang direncanakan (*Planned Behavior Theory*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1974; 1975) serta Ajzen dan Fishbein (2005). Dalam penjelasannya, Fishbein and Ajzen mengemukakan bahwa niat adalah anteseden seseorang dalam

berperilaku. Argumen ini sejalan dengan tahapan proses pembuatan keputusan etis yang mana niat berperilaku etis (tahap 3) adalah peristiwa yang berposisi sebagai anteseden dari perilaku etis (tahap 4). Ajzen dan Fishbein (2005) melanjutkan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap dalam berperilaku. Sikap dalam berperilaku sendiri adalah fungsi dari keyakinan keberperilaku (*behavioral beliefs*) yang sedikit banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai religius yang diyakini atau dianut oleh individu. Dengan demikian, nilai keagamaan (*religion*) merupakan faktor yang memengaruhi individu dalam bersikap dan berperilaku. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa proses pembuatan keputusan etis tidak lepas dari nilai-nilai yang diyakini individu sebelum akhirnya ia berada pada tahap akhir, yakni pelaksanaan aksi perilaku etis ketika menghadapi situasi dilema etika. Berangkat dari hal itu, maka penting dilakukan pembuktian nyata konsep yang dipaparkan ini. Penjelasan ini sekaligus merupakan gagasan utama mengapa penelitian ini mencoba menguji pendidikan karakter keagamaan yang diduga menjadi dasar terbentuknya keyakinan berperilaku sebagaimana argumen dari Ajzen dan Fishbein (2005) di atas.

### **Kecurangan Pelaporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)**

Kecurangan pelaporan merupakan salah satu jenis kecurangan manajemen (Singleton dan Singleton 2010). Kecurangan manajemen adalah niatan melakukan kecurangan pelaporan keuangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen dengan harapan mendapatkan keuntungan, seperti promosi jabatan, bonus, dan insentif ekonomi lainnya (Singleton dan Singleton 2010). Skema kecurangan pelaporan keuangan dapat dikategorikan menjadi kecurangan finansial dan non-finansial. Kecurangan yang dilakukan oleh individu merupakan suatu perilaku yang didasari oleh faktor eksternal dan internal yang dihadapi dan ada pada individu itu sendiri (Trevino 1986; Rotter 1990; Ponemon 1992; Tsui dan Ferdinand 1996; Rutledge dan Karim

1999; Liyanarachchi dan Newdick 2009; Mayhew dan Murphy 2009; Murphy dan Mayhew 2012; Sofyani dan Pramita 2014).

Selain itu, pendidikan etika atau nilai-nilai etis dalam bingkai pendidikan karakter keagamaan juga diduga menjadi faktor lain yang memengaruhi individu dalam bertindak etis (Mayhew dan Murphy 2009; Ajzen dan Fishbein 2005; Juanda dan Sofyani 2016; Sofyani et al. 2016). Mayhew dan Murphy (2009) menemukan bahwa pendidikan bertema etika memiliki pengaruh terhadap perilaku etis individu (berposisi sebagai akuntan) dalam hal pelaporan keuangan ketika pelaporan tersebut disampaikan kepada publik atau tidak. Dari hasil eksperimen yang mereka lakukan, ditemukan individu yang mengikuti pendidikan bertema etika akan lebih bersikap etis dengan cara membuat laporan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dibandingkan individu yang tidak mengikuti pendidikan etika, meskipun pelaporan tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada publik. Penghadiran dua faktor yang saling bertolak belakang secara bersamaan, seperti riset Mayhew dan Murphy (2009), menjadi hal penting ketika melakukan pengujian terkait perilaku etis individu agar dapat memberikan gambaran faktor yang dapat mendominasi dan memitigasi faktor lain. Oleh karena itu, eksperimen ini akan menguji bagaimana interaksi dari faktor penggiring perilaku tidak etis dan faktor penggiring perilaku etis individu dalam satu desain eksperimen.

## Pengembangan Hipotesis

### ***Otoritas Atasan dan Kecurangan Pelaporan***

Murphy dan Mayhew (2012) menemukan bahwa otoritas atasan untuk melaporkan lebih dari seharusnya memengaruhi individu untuk berperilaku tidak etis dengan mengalihkan atau menggeser tanggung jawab atas perilaku kecurangan yang dilakukannya kepada pemberi otoritas. Individu yang diperintahkan melakukan tindakan tidak etis oleh atasannya akan mematuhi perintah tersebut karena dia melihat dirinya sebagai alat untuk melakukan tindakan tidak etis oleh atasannya sehingga

dirinya merasa tidak perlu bertanggung jawab atas tindakan tersebut (Milgram 1974; Sofyani dan Pramita 2014). Selain penelitian Murphy dan Mayhew (2012), argumen ini juga dikuatkan oleh penelitian Sofyani dan Pramita (2014) yang menemukan bahwa otoritas atasan untuk membuat laporan curang memberikan pengaruh signifikan kepada individu untuk berbuat tidak etis dalam bentuk mematuhi instruksi membuat laporan yang tidak sesuai dengan semestinya. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Perilaku kecurangan pelaporan keuangan ditemukan lebih tinggi pada kondisi terdapat otoritas atasan untuk berbuat curang dibandingkan kondisi tidak terdapat otoritas kecurangan.**

### ***Pendidikan Karakter Keagamaan dan Kecurangan Pelaporan***

Agama sebagai suatu ajaran ketuhanan yang bersumber dari wahyu mengandung nilai-nilai universal bagi kehidupan umat manusia, baik dalam aktivitas kegiatan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Hal ini berarti bahwa agama diturunkan untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan dunia maupun akhirat (Aziz 2008). Dalam kehidupan sosial, tidak terkecuali dalam interaksi di dalam sebuah institusi, nilai-nilai ajaran agama adalah petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan seluruh *problem* kehidupan manusia, termasuk *problem* ekonomi manusia (Triono 2014). Dalam Islam, tiga aspek penting dalam dimensi normatif ajaran agama yang harus dipahami dan dimengerti adalah: *pertama*, ketuhanan yang berwujud pada keimanan pada sang pencipta secara utuh dan bulat; *kedua*, kepatuhan dan ketaatan secara *lahiriyah-bathiniyah* (perilaku dan niat di dalam hati) dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa; dan *ketiga*, berbuat baik dan penuh tanggung jawab atas kebaikan secara luas dan jauh dari sifat khianat (Aziz 2008). Ketiga aspek inilah yang selanjutnya disebut sebagai karakter keagamaan (*religiosity*). Dalam membentuk kepribadian utuh secara individual dan sosial kultural yang dibangun

oleh tiga aspek tersebut, diperlukan kerja keras dan proses yang panjang, baik secara *infradi (person)* maupun *ijtima'l-nidzami (system)* (Aziz 2008). Oleh karena itu, pembentukan karakter keagamaan ini penting dibuat dalam satu program terencana dan berjangka agar upaya mendidik individu yang taat, jujur, dan amanah dapat berjalan dengan baik.

Dalam kaitannya dengan proses individu membuat keputusan etis, nilai-nilai agama yang terbentuk dari keikutsertaan individu pada program pendidikan karakter keagamaan akan menjadi hal yang sedikit banyak memengaruhi individu tersebut dalam membuat keputusan etis. Proses ini dapat dijelaskan oleh teori perilaku yang direncanakan (*planned behavior theory*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1974; 1975) dan Ajzen dan Fishbein (2005). Menurut kaca mata perilaku terencana, niat adalah anteseden seseorang dalam berperilaku yang mana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap dalam berperilaku. Sikap dalam berperilaku sendiri adalah fungsi dari keyakinan keberperilakuan (*behavioral beliefs*). Keyakinan ini bisa jadi dibentuk oleh nilai-nilai religius yang diyakini atau dianut oleh individu. Dengan demikian, nilai keagamaan (*religion*) merupakan faktor yang memengaruhi individu dalam bersikap dan berperilaku (Fishbein dan Ajzen 1974; Fishbein dan Ajzen 1975; Ajzen dan Fishbein 2005), yang dalam hal ini sudah semestinya terhubung dengan proses individu dalam membuat keputusan etis dan tindakan etis.

Mayhew dan Murphy (2009) mengemukakan bahwa pendidikan adalah sarana penting untuk mendidik para akuntan agar bersikap etis ketika berada di lingkup pekerjaan mereka. Selain pendidikan etika, pendidikan keagamaan yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan dan identik dengan nilai-nilai etis juga diduga memiliki pengaruh positif terhadap perilaku etis seseorang. Argumen ini sebagaimana penelitian Mazereeuw-van der Duijn Schouten et al. (2014) yang menemukan bahwa nilai-nilai ajaran agama yang ditaati (*religiosity*) dari individu yang diperoleh dari pendidikan karakter keagamaan yang sarat dengan nilai-nilai etis memiliki hubungan

terhadap perilaku atau cara berperilaku individu tersebut (Mayhew dan Murphy 2009). Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Perilaku kecurangan pelaporan keuangan partisipan yang menempuh pendidikan karakter keagamaan lebih rendah dibandingkan partisipan yang tidak menempuh pendidikan karakter keagamaan.**

### ***Interaksi Faktor Otoritas Atasan dan Pendidikan Karakter Keagamaan***

Sebagaimana pendapat Murphy dan Mayhew (2012) serta Sofyani dan Pramita (2014), kecurangan akan mungkin dilakukan ketika terdapat otoritas dari atasan kepada bawahannya selaku pembuat laporan realisasi anggaran. Namun, otoritas ini bisa jadi mendapat penolakan dari individu yang pernah mengikuti pendidikan karakter keagamaan. Hal itu disebabkan oleh kuatnya nilai-nilai agama yang sarat dengan etika baik yang tertanam pada diri individu tersebut, sehingga diduga perilaku etis individu yang meskipun mendapat perintah membuat kecurangan pelaporan, akan muncul jika para individu di dalam organisasi memiliki keyakinan keberperilakuan etis, yang mana nilai etis ini identik dengan ajaran agama (*religion*) yang diajarkan secara sistematis dan terus-menerus kepada individu tersebut. Keyakinan keberperilakuan yang diperoleh dari nilai keagamaan (*religion*) yang dianut merupakan faktor yang memengaruhi individu dalam bersikap dan berperilaku (Fishbein dan Ajzen 1974; Fishbein dan Ajzen 1975; Ajzen dan Fishbein 2005). Hal ini sejalan dengan argumen Mazereeuw-van der Duijn Schouten et al. (2014) yang menjelaskan bahwa nilai-nilai ajaran agama yang ditaati (*religiosity*) dari individu yang diperoleh dari pendidikan karakter keagamaan yang sarat dengan nilai-nilai etis (Mayhew dan Murphy 2009) memiliki hubungan terhadap perilaku atau cara berperilaku individu tersebut, termasuk ketika menghadapi dilema etika. Berdasarkan argumen tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H<sub>3a</sub>**: Perilaku kecurangan pelaporan keuangan ditemukan paling tinggi pada situasi terdapat otoritas atasan untuk berbuat curang serta individu tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan dibandingkan situasi lainnya.

**H<sub>3b</sub>**: Perilaku kecurangan pelaporan keuangan ditemukan paling rendah pada situasi tidak ada otoritas atasan untuk berbuat curang serta individu mengikuti pendidikan karakter keagamaan dibandingkan situasi lainnya.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain 2x2 faktorial *between subject*, yaitu desain eksperimen yang secara simultan mengakomodasi penelitian atas pengaruh dua atau lebih variabel independen, baik pengaruh utama maupun pengaruh interaksi terhadap variabel dependen. Desain ini bermanfaat untuk pelaksanaan eksperimen yang mempunyai dua atau lebih variabel independen (disebut faktor) dengan masing-masing faktor memiliki paling sedikit dua level (Nahartyo 2012). Data mengenai perilaku etis partisipan diperoleh dari hasil jawaban partisipan yang mengikuti eksperimen. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan uji beda (*t-test*) untuk hipotesis 1 dan 2 dan analisis varian (ANOVA) dan uji kontras (*contrast test*) pada ANOVA untuk hipotesis 3a dan 3b.

Dalam faktanya, perilaku tidak hanya dibentuk ketika menempuh pendidikan di universitas, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang dilalui oleh individu. Oleh karena itu, desain eksperimen ini dibuat dengan dua kali pengujian agar dapat memberikan tambahan keyakinan dari hasil penelitian ini yang menjelaskan bahwa perilaku memang dipengaruhi oleh *treatment*. Pengujian yang dimaksud yakni: (1) membandingkan perilaku etis partisipan yang

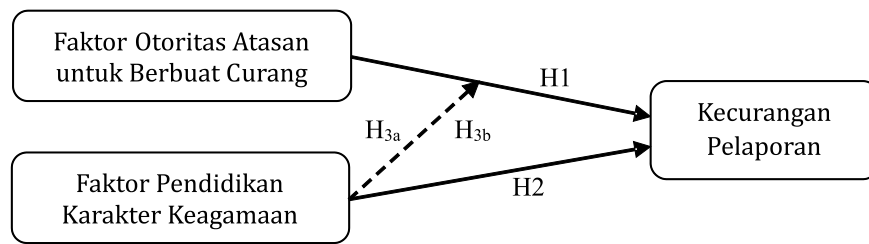
mengikuti pendidikan karakter keagamaan dan tidak; dan (2) menguji perilaku etis partisipan sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan karakter keagamaan.

### Partisipan (Subjek) Penelitian

Partisipan (subjek) eksperimen penelitian ini terdiri dari dua kelompok. Pertama, adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di salah satu perguruan tinggi berbasis kurikulum ke-Islaman dan mengadakan program pendidikan karakter keagamaan (asrama mahasiswa selama tiga bulan)<sup>3</sup>. Partisipan kedua adalah mahasiswa jurusan Akuntansi di salah satu perguruan tinggi yang tidak berbasis kurikulum ke-Islaman dan tidak mengadakan program pendidikan karakter keagamaan<sup>4</sup>. Partisipan disyaratkan telah menempuh mata kuliah Akuntansi Manajemen, khususnya materi pembuatan laporan realisasi anggaran organisasi (untuk seluruh partisipan). Pemilihan partisipan dengan kriteria tersebut dimaksudkan agar partisipan sudah memiliki pemahaman terkait penyusunan laporan realisasi anggaran. Khusus partisipan yang mengikuti pendidikan karakter keagamaan harus mengikuti mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf, etika bisnis Islam, serta tinggal di asrama mahasiswa yang menjalankan pendidikan karakter keagamaan.

<sup>3</sup> Pendidikan karakter keagamaan yang diselenggarakan adalah pembelajaran ajaran agama dengan bahan kajian kitab-kitab klasik dan kontemporer dari cendekiawan zaman dahulu dan sekarang, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai pokok ajaran agama (Keimanan, Hukum, dan Akhlak yang Mulia). Selain itu, pendidikan karakter keagamaan didesain sedemikian rupa untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari pada bahan kajian dalam kegiatan di kehidupan sehari-hari. Meskipun bahan kajian banyak yang bersumber dari kitab-kitab klasik, tetapi pemahaman terkait ajaran fundamentalnya dibahas dan ditransformasikan dalam pemahaman kehidupan di zaman sekarang (faham Islam kekinian). Pendidikan karakter keagamaan yang diselenggarakan universitas ini merupakan program yang diturunkan dari visi dan misi universitas yang menghendaki setiap lulusannya tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi memiliki kepribadian dan budi pekerti yang mulia, serta taat terhadap ajaran agama.

<sup>4</sup> Nama perguruan tinggi sengaja tidak diungkap peneliti demi menjaga nama baik instansi terkait.



**Gambar 2**  
**Desain Eksperimen**

Meskipun partisipan adalah mahasiswa yang belum bekerja dan belum memiliki atasan, untuk menciptakan kondisi yang sama dengan yang terjadi di konteks dunia kerja, peneliti membuat manipulasi yang diberikan melalui studi kasus yang mengindikasikan posisi partisipan dalam kasus tersebut (Liyanarachchi dan Newdick 2009; Madein dan Sholihin 2015).

**Model Penelitian**

Desain model penelitian eksperimen dan pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

**Prosedur Ekperimen**

**Desain Eksperimen**

Partisipan dibagi ke dalam dua sel yang berbeda dengan perlakuan seperti yang

digambarkan pada desain eksperimen di Tabel 1, 2 dan 3.

Sebelum penelitian eksperimen dilakukan, peneliti melakukan cek manipulasi untuk meyakinkan apakah partisipan siap untuk mengikuti eksperimen atau tidak<sup>5</sup>. Cek manipulasi juga meliputi pemahaman partisipan mengenai tugas eksperimen yang harus dilakukan dan pemahaman terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan

<sup>5</sup> Partisipan dari program studi ekonomi syariah tidak seluruhnya paham mengenai mekanisme pembuatan anggaran dan laporan realisasi anggaran. Oleh karena itu, pra-eksperimen dan cek manipulasi sangat penting dilakukan agar menjamin bahwa pemahaman partisipan benar-benar mumpuni untuk dijadikan partisipan penelitian. Cek manipulasi juga bertujuan untuk meyakinkan seluruh partisipan memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas eksperimen.

**Tabel 1**  
**Desain Eksperimen dan Pengujian Hipotesis 1**

Faktor Otoritas Atasan	Posisi SEL
Ada Otorisasi Kecurangan	SEL 1
Tidak Ada Otoritas Kecurangan	SEL 2

**Tabel 2**  
**Desain Eksperimen dan Pengujian Hipotesis 2**

Faktor Pendidikan Karakter Keagamaan	Posisi SEL
Tidak Mengikuti Pendidikan Karakter Keagamaan	SEL 1
Mengikuti Pendidikan Karakter Keagamaan	SEL 2

**Tabel 3**  
**Desain Eksperimen dan Pengujian Hipotesis 3a dan 3b**

Faktor Otoritas Atasan	Faktor Pendidikan Karakter Keagamaan	
	Tidak Mengikuti Pendidikan Karakter Keagamaan	Mengikuti Pendidikan Karakter Keagamaan
Ada Otoritas Kecurangan	SEL 1	SEL 2
Tidak Ada Otoritas Kecurangan	SEL 3	SEL 4



laporan realisasi anggaran. Cek manipulasi dilakukan dengan menanyai partisipan dengan pertanyaan sebagai berikut: (1) Apakah Anda memahami anggaran?, (2) Apakah Anda memahami fungsi dan cara membuat laporan realisasi anggaran?, (3) Apakah Anda memahami apa yang dimaksud dengan *mark-up*?, (4) Apakah Anda memahami fungsi laporan realisasi anggaran?.

Partisipan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diikuti dalam eksperimen ini. Selain itu, calon partisipan yang sebelumnya bersedia ikut dalam eksperimen ini tetapi datang terlambat juga tidak jadi diikuti dalam eksperimen. Hal ini bertujuan agar jalannya eksperimen sesuai dengan rencana peneliti dan tidak mengalami faktor lain yang mungkin akan mengganggu hasil eksperimen ini. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu mengacak partisipan ketika masuk ruang eksperimen dan mengacak tempat duduk partisipan dengan tujuan agar faktor-faktor lain yang ada pada diri partisipan tidak berpengaruh pada hasil riset atau terhindar dari bias. Selanjutnya, partisipan diminta untuk menjawab cerita kasus yang diajukan oleh peneliti.

### **Tugas Eksperimen**

Seluruh partisipan diminta membaca kasus eksperimen yang memuat manipulasi dalam bentuk cerita dengan sudut pandang orang ketiga. Partisipan kemudian memberikan keputusan untuk membuat laporan realisasi anggaran dengan *mark-up* atau tidak sebagai orang ketiga di cerita kasus yang diajukan. Jawaban partisipan yang dipersepsikan sebagai tokoh dalam cerita kasus tersebut dinilai sebagai perilaku partisipan yang sesungguhnya jika partisipan adalah tokoh yang ada dalam kasus (Liyanarachchi dan Newdick 2009; Madein dan Sholihin 2015). Setelah menjawab, partisipan ditanya alasan mengenai tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil partisipan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang diperoleh dari program pendidikan karakter keagamaan ataukah dari faktor lain.

### **Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis**

Hipotesis penelitian untuk  $H_1$  dan  $H_2$  diuji dengan uji beda t sampel independen (*independent sample t-test*), sedangkan  $H_{3a}$  dan  $H_{3b}$  diuji dengan uji *contrast* pada *analysis of variance* (ANOVA). Uji *contrast* berguna untuk membandingkan antara satu SEL dengan SEL lainnya (Kerlinger dan Lee 2000).  $H_1$  dijawab dengan membandingkan Jumlah Kecurangan Pelaporan (JKP) antara SEL 1 dengan SEL 2 pada Tabel 1. Hipotesis akan terdukung apabila JKP di SEL 1 pada Tabel 1 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan JKP di SEL 2 dan perbedaan tingkat JKP tersebut secara statistik berbeda.  $H_2$  dijawab dengan membandingkan JKP antara SEL 1 dengan SEL 2 pada Tabel 2. Hipotesis akan terdukung apabila JKP di SEL 1 pada Tabel 2 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan JKP di SEL 2 dan perbedaan tingkat JKP tersebut secara statistik berbeda. Selanjutnya,  $H_{3a}$  diuji dengan membandingkan JKP di SEL1 dengan SEL 2, 3, dan 4 pada Tabel 3.  $H_{3b}$  diuji dengan membandingkan JKP di SEL 4 dengan SEL 1, 2, dan 3 pada Tabel 3.  $H_{3a}$  dan  $H_{3b}$  akan terdukung ketika ditemukan JKP di SEL 1 paling tinggi dan JKP di SEL 4 paling rendah dibandingkan JKP di SEL lainnya dan signifikan secara statistik dengan menggunakan uji *contrast* pada ANOVA.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Demografi responden penelitian disajikan pada Tabel 4 dan pengujian hipotesis 1 disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5, dapat disimak bahwa pada kondisi ada otoritas kecurangan, maka JKP sebanyak 9 (sembilan) atau setara dengan 30% dari total partisipan penelitian. Sementara itu, JKP pada saat tidak terdapat otoritas kecurangan adalah 5 (lima) atau setara dengan 21,74% dari total partisipan penelitian. Dengan demikian, syarat pertama untuk mendukung hipotesis 1 telah terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji statistik (uji beda) untuk dapat menemukan simpulan perbedaan perilaku kecurangan pada dua kondisi berbeda tersebut, apakah

perbedaan tersebut didukung secara statistik atau tidak. Dari hasil uji beda (*t-test*), diperoleh nilai *t* hitung 2,213 yang mana nilainya lebih besar dari nilai *t* tabel 2,10. Di samping itu, ditemukan nilai *Sig.* (signifikansi) adalah 0,00 yang mana nilai ini lebih kecil daripada *p-value* 0,01 (1%) dan 0,05 (5%). Dengan demikian, **hipotesis 1 didukung** yang dengan kata lain secara statistik tingkat kecurangan pelaporan pada kondisi antara terdapat dan tidak terdapat otoritas kecurangan adalah berbeda.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Murphy dan Mayhew (2012) serta Sofyani dan Pramita (2014) yang menemukan bahwa otoritas atasan untuk membuat laporan curang memberikan pengaruh signifikan kepada individu untuk berbuat tidak etis dalam bentuk mematuhi instruksi atasannya dengan membuat laporan realisasi anggaran yang

tidak sesuai realita. Dalam skenario penelitian, telah disediakan *form* bagi partisipan untuk memberikan argumentasi mengenai alasan dari tindakan melakukan kecurangan. Dari berbagai argumentasi yang dituliskan, mayoritas partisipan memberikan jawaban takut mendapat pemecatan atau hambatan karir yang dilakukan oleh atasan jika tidak mematuhi perintah membuat laporan keuangan *mark-up* (curang). Terdapat pula jawaban yang menjelaskan bahwa kepatuhan dari partisipan yang diperintahkan melakukan tindakan tidak etis oleh atasannya menilai dirinya sebagai alat untuk melakukan tindakan tidak etis oleh atasannya sehingga partisipan tersebut merasa tidak bersalah dan menilai orang yang bertanggung jawab atas tindakannya adalah atasannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Milgram (1974) serta Sofyani dan

**Tabel 4**  
**Data Demografi Partisipan Eksperimen**

Keterangan	Jumlah
<b>Jenis kelamin</b>	
Laki-laki	19 orang
Perempuan	44 orang
<b>Semester</b>	
Tujuh	17 orang
Lima	46 orang
<b>Prodi</b>	
Ekonomi Syariah	26 orang
Akuntansi	37 orang
<b>Total Partisipan</b>	<b>63 orang</b>

**Tabel 5**  
**Pengujian Hipotesis 1**

Faktor Otoritas Atasan	Posisi SEL
Ada Otoritas Kecurangan	SEL 1
	N = 30
	JKP = 9 (30,00%)
	Mean = 13,93 DS = 9,45
Tidak Ada Otoritas Kecurangan	SEL 2
	N = 23
	JKP = 5 (21,74%)
	Mean = 9,73 DS = 3,77
<i>t</i> hitung	2,213
<i>Sig.</i> (2-tailed)	0,00

**Tabel 6**  
**Pengujian Hipotesis 2**

<b>Faktor Pendidikan Karakter Keagamaan</b>	<b>Posisi SEL</b>
Tidak Mengikuti Pendidikan Karakter Keagamaan	SEL 1
	N = 27
	JKP = 10 (37,04%)
	Mean = 14,48 DS = 9,16
Mengikuti Pendidikan Karakter Keagamaan	SEL 2
	N = 26
	JKP = 4 (15,38%)
	Mean = 9,12 DS = 9,10
<i>t</i> hitung	2,833
<i>Sig</i> (2-Tailed)	0,00

Pramita (2014) yang juga menemukan adanya pengalihan tanggung jawab oleh partisipan pembuat laporan keuangan curang dengan menyandarkan tanggung jawab perbuatan tersebut kepada pemberi otoritas.

Selanjutnya, dari pengujian hipotesis 2 (lihat Tabel 6) ditemukan bahwa pada kondisi partisipan tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan, maka JKP-nya adalah sebanyak 10 (sepuluh) atau setara 37,04% dari total partisipan penelitian. Sementara itu, JKP pada saat partisipan mengikuti pendidikan karakter keagamaan JKP-nya adalah 4 (empat) atau setara dengan 15,38% dari total partisipan penelitian. Dengan demikian, syarat pertama untuk mendukung hipotesis 2 telah terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji statistik terhadap tingkat *mark-up* yang dibuat partisipan untuk dapat menemukan simpulan perbedaan perilaku kecurangan pada dua kondisi berbeda tersebut.

Dari hasil uji beda (*t-test*), diperoleh nilai *t* hitung 2,833 yang mana nilainya lebih besar dari nilai *t* tabel 2,10. Di samping itu, ditemukan nilai *Sig.* (signifikansi) adalah 0,00 yang mana nilai ini lebih kecil daripada *p-value* 0,05 (5%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2** penelitian ini juga **terdukung**, yang dengan kata lain secara statistik tingkat kecurangan pelaporan antara partisipan yang tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan lebih tinggi dibandingkan dengan partisipan yang mengikuti pendidikan karakter keagamaan.

Hasil ini sejalan dengan anggapan dari teori perilaku yang direncanakan (*planned behavior theory*) bahwa nilai-nilai religius yang diyakini atau dianut oleh individu, dalam hal ini nilai-nilai religius tersebut diperoleh dari pendidikan karakter keagamaan, merupakan faktor yang memengaruhi individu tersebut dalam bersikap dan berperilaku (Fishbein dan Ajzen 1974; Fishbein dan Ajzen 1975; Ajzen dan Fishbein 2005). Dalam kehidupan sosial, tidak terkecuali dalam interaksi di dalam sebuah institusi, nilai-nilai ajaran agama merupakan aspek yang sesungguhnya menyertai seseorang dalam berperilaku, termasuk dalam konteks ekonomi dan bisnis manusia (Triono 2014). Secara khusus, dalam Islam, terdapat tiga aspek penting dalam dimensi normatif ajaran agama yang harus dipahami dan diamalkan, yakni: *pertama*, ketuhanan yang berwujud pada keimanan pada sang pencipta secara utuh dan bulat; *kedua*, kepatuhan dan ketaatan secara *lahiriyah-bathiniyah* (perilaku dan niat di dalam hati) dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa; dan *ketiga*, berbuat baik dan penuh tanggung jawab atas kebaikan secara luas dan jauh dari sifat khianat (Aziz 2008). Ketiga aspek inilah yang selanjutnya disebut sebagai karakter keagamaan (*religiosity*).

Dari hasil pengujian hipotesis dua, ditemukan bukti bahwa nilai-nilai religius yang diyakini individu dapat menjadi fondasi dalam berperilaku karena nilai-nilai tersebut secara tanpa sadar menjadi anteseden (pendahulu) dari seseorang dalam membuat pendapat

**Tabel 7**  
**Pengujian Hipotesis 3a dan 3b**

		Faktor Pendidikan Karakter Keagamaan	
		Tidak Mengikuti Pendidikan Karakter Keagamaan	Mengikuti Pendidikan Karakter Keagamaan
Faktor Otoritas Atasan	Ada Otoritas Kecurangan	SEL 1	SEL 2
		N = 15	N = 15
	JKP = 6 (40%)	JKP = 3 (20%)	
	Mean = 15,20	Mean = 9,00	
		DS = 9,31	DS = 2,10
Faktor Otoritas Atasan	Tidak Ada Otoritas Kecurangan	SEL 3	SEL 4
		N = 12	N = 11
	JKP = 4 (33,33%)	JKP = 1 (9,09%)	
	Mean = 14,67	Mean = 9,27	
		DS = 9,96	DS = 4,22

etis (*ethical judgment*) di dalam dirinya, sebagaimana yang dikemukakan Ajzen dan Fishbein (2005) dan Mazereeuw-van der Duijn Schouten et al. (2014). Berangkat dari temuan ini, maka sangat penting bagi para penyusun laporan keuangan untuk memiliki nilai religius yang diperoleh dari pendidikan karakter keagamaan. Nilai-nilai religius ajaran agama yang berlaku sebagai nilai prinsip dan fundamental bagi diri individu dapat menjadi referensi dalam menentukan indikator atau tolok ukur baik dan buruk dari suatu sikap dan tindakan dalam proses pembuatan pendapat etis individu tersebut di saat menghadapi dilema etika.

Namun, penting menjadi catatan bahwa ketika seseorang telah mengikuti pendidikan karakter keagamaan, maka tidak serta-merta seseorang itu menjadi sangat etis. Hal ini bergantung pada proses bagaimana nilai-nilai religius agama ditransformasikan ke dalam diri seseorang. Sebagaimana yang dikemukakan Juanda dan Sofyani (2016), meskipun seseorang telah mengikuti program pendidikan etika bertemakan keagamaan, tetapi pendidikan yang ditempuh tersebut dapat saja tidak memberikan dampak positif pada etika peserta didiknya. Hal itu dapat terjadi apabila pendidikan etika bertemakan keagamaan yang dijalankan tidak berorientasi kepada nilai-nilai substantif yang ingin ditanamkan kepada peserta didik, tetapi hanya sebatas seremonial formal pelengkap kurikulum perguruan tinggi. Fenomena ini

disebut Sofyani dan Akbar (2013; 2015) sebagai mimetik isomorfisma atau pelaksanaan suatu kebijakan tertentu yang hanya berperan sebagai legitimasi, yakni dalam hal ini adalah pendidikan etika keagamaan hanya diposisikan sebagai pelengkap kurikulum perguruan tinggi yang berafiliasi dengan agama. Dampak dari fenomena tersebut adalah hanya tercapainya religius afiliasi atau religius atribut dan bukan religius pada tataran komitmen (Porco 2003; Burks dan Sellani 2008; Putri 2016).

Selanjutnya, pengujian  $H_{3a}$  dan  $H_{3b}$  dapat disimak pada Tabel 7. Dari analisis deskriptif yang ditampilkan pada Tabel 7, ditemukan bahwa JKP tertinggi tampak ada pada kondisi terdapat otoritas kecurangan dan partisipan tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan ( $H_{3a}$ ). Sementara itu, JKP terendah ada pada kondisi tidak terdapat otoritas kecurangan dan partisipan mengikuti pendidikan karakter keagamaan ( $H_{3b}$ ). Dengan demikian, syarat pertama terdukungnya  $H_{3a}$  dan  $H_{3b}$  telah terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji statistik ANOVA dengan uji *contrast* untuk dapat menemukan simpulan perbedaan perilaku kecurangan pada empat kondisi berbeda tersebut.

Dari Tabel 8 dapat disimak bahwa *Levene Statistic* Hipotesis 3a dan Hipotesis 3b adalah 0,00 yang maksudnya *variance* dari sampel berbeda. Sebagai konsekuensinya, maka pengujian *contrast* harus melihat kepada skor *Doesn't Assume Equal Variance*. Selanjutnya, *p-value* uji *contrast*  $H_{3a}$  yang

**Tabel 8**  
ANOVA dan Uji Kontras  $H_{3a}$  dan  $H_{3b}$

Uji Statistik	Keterangan	Sig.
Levene Statistic $H_{3a}$ dan $H_{3b}$		0.000*
ANOVA $H_{3a}$ (Between Group)	Sel 1 $\neq$ Sel 2, 3, 4	0.043**
ANOVA $H_{3b}$ (Between Group)	Sel 4 $\neq$ Sel 1, 2, 3	0.043**
Contrast Test $H_{3a}$	Assume Equal Variance	0.186
	Doesn't Assume Equal Variance	0.174
Contrast Test $H_{3b}$	Assume Equal Variance	0.013**
	Doesn't Assume Equal Variance	0.026**

Keterangan: \*signifikan pada level 0.01; \*\*signifikan pada level 0.05

menguji signifikansi perbedaan SEL 1 dengan SEL 2, 3, dan 4 adalah 0.174. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa hasil uji *contrast* pada ANOVA dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3a tidak terdukung**. Sementara itu, *p-value* uji *contrast*  $H_{3b}$ , yang menguji signifikansi perbedaan SEL 4 dengan SEL 1, 2, dan 3 adalah 0.026 (signifikan pada *p-value* 0,05). Dengan demikian, dari hasil uji *contrast* ANOVA, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 3b terdukung**. Terdukungnya hipotesis 3b mengindikasikan bahwa pendidikan karakter keagamaan memiliki kekuatan untuk memitigasi faktor lain yang dapat menggiring individu kepada perilaku tidak etis, dalam kasus ini adalah faktor otoritas atasan untuk membuat laporan keuangan curang.

Kekuatan memengaruhi secara negatif faktor pendidikan karakter keagamaan terhadap faktor lain yang mendorong untuk berperilaku tidak etis juga dikuatkan dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan peneliti kepada subjek yang mengikuti pendidikan karakter keagamaan sebelum dan sesudah program<sup>6</sup>. Dari hasil pengujian eksperimen,

ditemukan bahwa sebelum mengikuti program terdapat 12 (dua belas) JKP dan setelah mengikuti program, dengan subjek yang sama, JKP berkurang menjadi 4 (empat). Secara uji statistik, yakni *paired sample test*, ditemukan nilai *t* hitung 14,833 yang lebih besar dari pada *t* tabel 2,093 dan signifikan pada *p-value* 0,00. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara statistik penurunan JKP dari subjek sebelum dan sesudah menempuh pendidikan karakter keagamaan terjadi secara signifikan. Meskipun tidak dirumuskan dalam hipotesis, tetapi temuan ini berkontribusi sebagai penguat temuan dari simpulan  $H_{3b}$  bahwa pendidikan karakter keagamaan berpengaruh secara negatif terhadap faktor lain yang dapat menggiring individu kepada perilaku tidak etis, dalam hal ini adalah otoritas untuk membuat laporan curang.

Adapun tidak terdukungnya Hipotesis 3a bisa jadi dikarenakan perhitungan signifikansi uji *contrast* menuntut *range* yang tinggi antar SEL sehingga ketika *range* antar SEL tidak terlalu tinggi, maka hasil uji *contrast* dinyatakan tidak signifikan. Hasil ini juga bisa jadi terkait sedikitnya subjek yang dilibatkan dalam satu SEL eksperimen. Hal menarik yang

<sup>6</sup> *Pre-test* adalah pengujian perilaku etis subjek eksperimen sebelum mengikuti pendidikan karakter keagamaan, sedangkan *post-test* adalah pengujian perilaku etis subjek eksperimen sesudah mengikuti pendidikan karakter keagamaan. Sebagaimana pemaparan Nahartyo (2012), desain eksperimen ini masuk dalam kategori eksperimen intrasubjek (*within subject*). Tujuan dilakukannya tahap ini adalah untuk menguji apakah terjadi perubahan perilaku etis dari subjek eksperimen sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan karakter keagamaan. Dengan demikian, hasil dari tahap ini dapat digunakan untuk mendukung secara empiris apakah pendidikan karakter keagamaan berpengaruh terhadap perilaku etis subjek. Dalam pengujian tahap *pre-test* dan *post-test*, ada hal yang perlu

diperhatikan, yakni apakah subjek mengalami peristiwa luar biasa (efek latihan, limpahan, atau peristiwa penting lain yang mengubah kondisi psikologis subjek) dalam kehidupan subjek yang menyebabkan subjek masuk kategori *outlier*. Untuk itu, penulis melakukan pengecekan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengonfirmasikan apakah subjek mengalami peristiwa luar biasa tersebut. Dari hasil konfirmasi diperoleh tiga subjek yang pernah mengikuti *pre-test* lalu mengalami peristiwa luar biasa yang menyebabkan subjek lebih religius sehingga dikeluarkan dari subjek eksperimen dan tidak diikutkan lagi untuk tahap *post-test*.

ditemukan dari eksperimen ini adalah terdapat partisipan yang membuat laporan realisasi anggaran dengan *mark-up* menilai bahwa *mark-up* yang nilainya kecil dianggap tidak material dan tidak merugikan institusi sehingga subjek tersebut terdorong untuk membuat laporan curang dengan *mark-up*. Pandangan partisipan tersebut seolah menghalalkan kecurangan jika nilainya dianggap kecil. Padahal, seharusnya sebesar apapun tindak kecurangan dalam praktik akuntansi, maka hal itu tidak dapat dibenarkan (Triyuwono 2012). Selanjutnya, tidak terdukungnya Hipotesis 3a secara statistik ini tidak berarti hasil tersebut diabaikan. Hal ini dikarenakan jika diasumsikan nilai kecurangan ini dalam satuan ratusan juta atau bahkan miliar rupiah, maka bisa jadi uji *contrast* akan menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian ini. Maka dari itu, hasil ini dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan dalam membuat desain eksperimen pada penelitian serupa di masa mendatang.

### SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor pendidikan karakter keagamaan dan faktor otoritas atasan untuk berbuat curang serta menguji interaksi kedua faktor tersebut terhadap perilaku etis akuntan. Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa pada saat ada otoritas atasan untuk membuat laporan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, maka akan cenderung menjadikan individu yang mendapatkan otoritas tersebut berbuat curang (tidak etis). Selanjutnya, partisipan yang mengikuti pendidikan karakter keagamaan memiliki kecenderungan untuk berperilaku etis dengan membuat laporan sesuai kenyataannya. Sementara itu, hasil dari interaksi kedua faktor tersebut adalah ketika tidak ada otoritas kecurangan pelaporan dan partisipan mengikuti pendidikan karakter keagamaan, maka jumlah kecurangan pelaporan paling sedikit dibandingkan kondisi lainnya. Dengan kata lain, kecenderungan untuk berperilaku tidak etis yang digiring oleh faktor adanya

otoritas atasan untuk berbuat curang dapat dimitigasi oleh faktor pendidikan karakter keagamaan yang pernah diikuti partisipan.

Prediksi kondisi dimana tidak terdapat otoritas kecurangan pelaporan dan partisipan tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan maka jumlah kecurangan akan tinggi ( $H_{3a}$ ), ternyata tidak terdukung secara statistik, meskipun terdukung secara hitungan matematis sederhana. Maksudnya adalah kondisi dimana tidak terdapat otoritas kecurangan pelaporan dan partisipan tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan ditemukan jumlah kecurangan adalah yang paling tinggi (6 kecurangan). Akan tetapi, hasil tersebut tidak dianggap berbeda secara signifikan menurut statistik dibandingkan dengan kondisi para partisipan yang tidak mendapatkan otoritas kecurangan dan mereka tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan (4 kecurangan). Dengan kata lain, jumlah kecurangan partisipan yang menghadapi otoritas kecurangan pelaporan dan mereka tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan (6 kecurangan) dianggap sama dengan perilaku etis para partisipan yang tidak mendapatkan otoritas kecurangan dan mereka tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan (4 kecurangan). Meskipun  $H_{3b}$  pada penelitian ini tidak terdukung, temuan ini memberikan penjelasan bahwa pola perilaku etis pelaporan keuangan para partisipan cenderung lebih dipengaruhi oleh pendidikan karakter keagamaan dibandingkan dengan ada atau tidaknya otoritas atasan.

Alasan yang mungkin menjelaskan hasil tersebut adalah adanya kemungkinan perhitungan signifikansi uji *contrast* menuntut *range* yang tinggi antar SEL sehingga ketika *range* antar SEL tidak terlalu tinggi, maka didapatkan hasil yang tidak signifikan pada hasil uji *contrast*. Hasil ini juga bisa jadi terkait sedikitnya subjek yang dilibatkan dalam satu SEL eksperimen. Namun, tidak terdukungnya  $H_{3a}$  secara statistik ini tidak berarti bahwa hasil tersebut diabaikan. Jika diasumsikan nilai kecurangan ini diprosikan dalam satuan ratusan juta rupiah dan bukan persentase sebagaimana eksperimen ini, bisa

jadi uji *contrast* akan menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, sekecil apapun kecurangan pelaporan tetap menjadi perhatian pemangku kepentingan dan lembaga pengawas yang bertugas. Selain itu, hasil ini menjadi isu menarik untuk dielaborasi dan diteliti kembali.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter keagamaan yang diselenggarakan universitas memiliki dampak positif terhadap perilaku etis individu. Maka, implikasi penting yang menjadi masukan, khususnya bagi kalangan praktisi yang membuat kebijakan, adalah perlu kiranya untuk memperhatikan individu yang menempati posisi berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pertama, disarankan jika posisi tersebut ditempati oleh mereka yang memiliki pengalaman menempuh pendidikan karakter keagamaan tertentu, tidak terbatas kepada agama atau keyakinan tertentu, sejauh agama dan keyakinan yang dianut mengajarkan kebaikan. Hal itu karena nilai-nilai keagamaan yang ditempuh oleh seseorang dinilai mampu menggiring individu tersebut untuk bersikap dan berperilaku etis serta mampu memitigasi adanya faktor lain yang menggiring kepada sikap dan perilaku tidak etis. Kedua, sejalan dengan hasil riset Sofyani dan Pramita (2014), posisi pembuat laporan keuangan di lembaga pemerintah seharusnya bebas dari tekanan pihak manapun agar mereka mampu untuk bekerja jujur dan membuat laporan sebagaimana yang seharusnya. Akan tetapi, tentu hal ini sulit direalisasikan karena lingkungan kerja biasanya menuntut setiap anggota organisasi untuk saling berinteraksi. Oleh karena itu, setidaknya hal itu perlu menjadi perhatian bagi pimpinan dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan yang melekat. Pertama, penelitian ini hanya menguji apakah program pendidikan karakter keagamaan yang diikuti oleh individu berpengaruh terhadap perilaku etis individu tersebut, tetapi belum mampu menjelaskan secara khusus aspek apa dari pendidikan karakter keagamaan tersebut yang memengaruhi perilaku etis individu yang menjalaninya. Oleh karena itu, untuk penelitian

selanjutnya disarankan untuk membuat desain eksperimen yang dapat menangkap fenomena nilai-nilai apa saja dari ajaran agama yang dapat memengaruhi perilaku etis akuntan. Kedua, eksperimen ini melibatkan subjek atau partisipan dari kalangan mahasiswa yang sarat dengan pro-kontra mengenai sah tidaknya partisipan mahasiswa mewakili partisipan yang seharusnya dipilih dari praktisi. Meskipun demikian, peneliti sudah melakukan manipulasi kondisi agar partisipan merasa bekerja di lingkungan pemerintahan dan dibawahi oleh seorang atasan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk diujikan pada partisipan akuntan atau pejabat yang menangani pelaporan keuangan di lingkup insitusi pemerintahan.

Ketiga, walaupun manipulasi dilakukan dengan sedemikian rupa, tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang tidak terkontrol oleh peneliti. Hal itu dikarenakan penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dalam menguji apakah manipulasi berpengaruh pada perilaku etis individu, sedangkan faktor pembentuk karakter individu di masa lalu yang dapat memengaruhi perilaku etis individu itu sendiri, tidak dapat dipungkiri, tentu memengaruhi hasil penelitian ini. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam menyimpulkan hasil penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti sudah melakukan randomisasi kepada partisipan penelitian agar faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap perilaku etis partisipan dapat tereliminasi meskipun hanya sebagian. Berangkat dari hal ini, riset selanjutnya sangat disarankan untuk membuat desain eksperimen yang lebih detail dan kuat.

Keempat, partisipan penelitian untuk partisipan yang tidak mengikuti pendidikan karakter keagamaan didominasi oleh mahasiswi (perempuan). Hal ini dikarenakan penelitian ini bersifat suka rela dan yang mau berpartisipasi dalam penelitian ini kebanyakan adalah mahasiswi (perempuan). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan harus membagi secara proporsional partisipan penelitian dalam hal *gender*. Kelima, partisipan yang dilibatkan dalam SEL eksperimen

dinilai masih sedikit. Oleh karena itu, riset selanjutnya yang mengembangkan isu sejenis dianjurkan untuk memperbanyak jumlah partisipan eksperimen di setiap SEL. Terakhir, karena penelitian ini menggunakan desain eksperimen yang terkenal kuat dalam validitas internal tetapi lemah dalam validitas eksternal, maka pembaca disarankan untuk berhati-hati dalam melakukan penyimpulan yang bersifat umum atau menggeneralisasi hasil penelitian ini pada kondisi dan situasi lain yang serupa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. and M. Fishbein. 2005. *The Influence of Attitudes on Behavior*. In D. Albarracín, B. T. Johnson, and M. P. Zanna (Eds.), *The Handbook of Attitudes* (pp. 173-221). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Allmon, D. E., D. Page, and R. Roberts. 2000. Determinants of Perceptions of Cheating: Ethical Orientation, Personality and Demographics. *Journal of Business Ethics*, 23 (4), 411-422.
- Aziz, A. 2008. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burks, B. D. and R. J. Sellani. 2008. Ethics, Religiosity, and Moral Development of Business Students. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics, Fall*, 49-70.
- Cohen, J. F., L. W. Pant, and D. J. Sharp. 1993. Culture-Based Ethical Conflicts Confronting Multinational Accounting Firms. *Accounting Horizons*, 7 (3), 1-13.
- Cohen, J. R. and N. M. Bennie. 2006. The Applicability of a Contingent Factors Model to Accounting Ethics Research. *Journal of Business Ethics*, 68 (1), 1-18.
- Fishbein, M. and I. Ajzen. 1974. Attitudes towards Objects as Predictors of Single and Multiple Behavioral Criteria. *Psychological Review*, 81 (1), 59-74.
- Fishbein, M. and I. Ajzen. 1975. *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Jones, J., D. W. Massey, and L. Thorne. 2003. Auditors' Ethical Reasoning: Insights from Past Research and Implications for the Future. *Journal of Accounting Literature*, 22, 45-103.
- Jones, T. M. 1991. Ethical Decision Making by Individuals in Organizations: An Issue-Contingent Model. *The Academy of Management Review*, 16 (2), 366-395.
- Juanda dan H. Sofyani. 2016. Konsep Pendidikan Karakter Keagamaan untuk Calon Akuntan: Studi Kasus di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17 (2), 186-196.
- Kerlinger, F. N. and H. B. Lee. 2000. *Foundations of Behavioral Research 4<sup>th</sup>*. Fort Worth, TX : Harcourt College Publishers.
- Liyanarachchi, G. and C. Newdick. 2009. The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New Zealand Evidence. *Journal of Business Ethics*, 89 (1), 37-57.
- Madein, A. and M. Sholihin. 2015. The impact of social and Environmental Information on Managers' Decisions: Experimental Evidence from Indonesia. *Asian Review of Accounting*, 23 (2), 156-169.
- Mayhew, B. W. and P. R. Murphy. 2009. The Impact of Ethics Education on Reporting Behavior. *Journal of Business Ethics*, 86 (3), 397-416.
- Mazereeuw-van der Duijn Schouten, C., J. Graafland and M. Kaptein. 2014. Religiosity, CSR Attitudes, and CSR Behaviour: An Empirical Study of Executives' Religiosity and CSR. *Journal of Business Ethics*, 123 (3), 437-459.
- Milgram, S. 1974. *Obedience to Authority an Experimental View*. New York: Harper dan Row Publisher, Inc.
- Murphy, P. R. and B. W. Mayhew. 2012. *The Impact of Authority on Reporting Behavior*. Working Paper, SSRN. Diunduh tanggal 20 Februari 2015, <http://ssrn.com/abstract=2026449>.



- Nahartyo, E. 2012. *Desain dan Implementasi Riset Eksperimen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ponemon, L. A. 1992. Auditor Underreporting of Time and Moral Reasoning: An Experimental Lab Study. *Contemporary Accounting Research*, 9 (1), 171- 189.
- Porco, B. M. 2003. *Factors Affecting the Cognitive Moral Development of Undergraduate Accounting Students: Ethics Education, Internships, Volunteerism, and Beta Alpha Psi*. Dissertation, Fordham University.
- Putri, C. M. 2016. Pengaruh Jalur Pelaporan dan Tingkat Religiusitas terhadap Niat Seseorang Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17 (1), 42-52.
- Raab, M. S. 1987. Detecting and Preventing Financial Statement Fraud: The Roles of the Reporting Company and the Independent Auditor. *Yale Law & Policy Review*, 5 (2), 514-535.
- Rest, J. R. 1986. *DIT Manual: Manual for Defining Issues Test 3<sup>rd</sup>*. Minneapolis, MN: Center for the Study of Ethical Development, University of Minnesota.
- Rest, J. R. and D. Narvaez. 1998. *Guide for DIT-2, Defining Issue Test Version 3.0*. Minneapolis, MN: Center for the Study of Ethical Development, University of Minnesota.
- Rotter J. B. 1990. Internal versus External Control of Reinforcement. *American Psychologist*, 45 (4), 489-493.
- Rutledge, R. W. and K. E. Karim. 1999. The Influence of Self-Interest and Ethical Considerations on Managers' Evaluation Judgments. *Accounting, Organizations and Society*, 24 (2), 173-184.
- Singleton, T. W. and A. J. Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting 4<sup>th</sup>*. New Jersey: Wiley.
- Sofyani, H., M. R. F. Anggraini, dan S. Ayunani. 2016. Islamic Education Mentoring Program and the Religiosity of Prospective Accountant. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1 (2).
- Sofyani, H. dan R. Akbar. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10 (2), 184-205.
- Sofyani, H. dan R. Akbar. 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19 (2), 153-173.
- Sofyani, H. dan Y. D. Pramita. 2014. Otoritas Atasan, Retaliasi dan Locus of Control sebagai Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Manipulasi Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 3 (2), 415-506.
- Trevino, L. K. 1986. Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. *The Academy of Management Review*, 11 (3), 601-617.
- Triono, D. C. 2014. *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*. Yogyakarta: Ikitaz.
- Triuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori 2<sup>nd</sup>*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tsui, J. S. L. and A. G. Ferdinand. 1996. Auditors' Behaviour in an Audit Conflict Situation: A Research Note on the Role of Locus of Control and Ethical Reasoning. *Accounting, Organizations and Society*, 21 (1), 41-51.